DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

- Amaludin, Andi 1964. Korupsi di Indonesia, Masalah dan pemecahannya, PT. Gramedia, Jakarta.
- Amirudin, dan Zainal A, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Arief, BN, 2005, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 2002, Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Djaja Ermansyah, 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi pemberantas Korusi), Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, A2004, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hartanti, E 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya 2002, *Pembahasan Permasalahan, dan Penerapan KUHAP* (*Penyidikandan Penuntutan*), Sinar Grafika, Jakarta.
- Lexy JM,2009, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Myrdal, Gurnal 1968. Asia Drama, Volume II, New York. Pantheon.
- Purnomo, B 1983, Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta.
- Poerwadarminta WJS,1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Prinst, Darwan 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Prodjohamidjojo, Martiman 2001, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi Undang- undang Nomor 31Tahun 1999, Mandar Maju, Bandung.
- Rafi, Abu Fida abdur, 2006, Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa), Republika, Jakarta.
- Rohim, 2008, Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Pena Multimedia, Jakarta.
- Soekanto, Soedjono dan Sri Mamudji, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Subagyo, 1997, Metode Penelitian dalam Teri dan Praktek. Rieneka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif dan R&D), Alfabeth, Bandung.
- Wijowasito, 1999, Kamus Umum Belanda Indonesia, PT. Ikhtiar Baru, Jakarta
- Yuda, C 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Praneda Media, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakya Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan DPR Nomor: 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

C. Sumber Lain

Putusan Perkara Nomor: 80/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt. Pst.